

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Syakir Media Press Raja Grafindo Persada), 2021. 103.
- Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011, 20.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*, Yogyakarta, (PT. RajaGrafindo Persada, 2016). 1.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang Banyumedia Publishing, 2003), 4.
- Ahmad Khoirul Umam, *Pergulatan Demokrasi dan Politik Anti Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta Pustaka belajar 2014).
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001), 22.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cet 2, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), 4-5.
- Artifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, Penerbit: Rajawali Press, 2009. Jakarta. 5.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Citra aditia Bakti, Bandung), 22.
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan System Pemidanaan di Indonesia*, (Penerbit Pustaka. Magister, Semarang) 2007.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika, Jakarta 2007). 1.

- HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 308.
- Ida Bagus Anggapurana Pidada dkk, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, (Widada Bhakti Persada, Bandung 2022), iii.
- Joenaedi effendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta, KENCANA, 2016), 188.
- Johnny Ibrahim *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006),. 57.
- K. Wantjik Saleh, *Korupsi dan Suap*, (Ghalia Indonesia, Jakarta), 2008, 36.
- Lilik Mulyadi, *Perbaikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung Alumni 2007). 3.
- Memahami Untuk Membasmi, *Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), 2006).
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), 27.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Yogyakarta, 2000), 54.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1999), 40.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (NTB, Mataram Press, 2020), 45.
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Pustaka Mahardika, Yogyakarta), 82.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, 1-2.

Jurnal

Artidjo Alkostar, 'Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara Modern', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 16, pp, 2009. 155–79, doi:<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3871/3446>.

Ade Mahmud. "Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. 3, No. 2, 2017, 143.

Budi Suhariyanto, *Penerapan Uang Pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 7 No 1, 2018, 113-130.

Diky Anandya, Kurnia Ramdhana. Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023, Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch, 2024, 12.

Fachry Ali Firdaus Agam Noor Syahbana. PROBLEMATIKA PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN. Analisis APBN Bidang Komisi III, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. 2022.

Fachry Ali Firdaus Agam Noor Syahbana, PROBLEMATIKA PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN. Analisis APBN Bidang Komisi III, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. 2022.

Intan Munira, Moh. Din, Effendi, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 19 No 2, 2017, 345-366.

Integritas PPATK Mengawal Asta Cita Indonesia, Laporan tahunan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2024, 65.

- Kornelius Benuf, & Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, 7, no. 1, 2020, 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>, 26.
- Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini, Husnaini. Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No.1, 2020, 82-83.
- Munzil Fontian, Dkk "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Dalam Rangka Melindungi Ekonomi Negara Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 1, 2015, 42.
- Missleini, Evi Retno Wulan. The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K/PID2-23. Universitas Narotama Surabaya. *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 10 No. 1, 2024. 188.
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 82.
- Sholihul Hakim, Sandrina Rahma Nurvita, Louisa Aulia Azzahra, Indah Putri Malinda, Chornilia Shilvi Putri Januari, 2025. Kendala Pengembalian Aset Korupsi Melalui Lelang (Studi Kasus H. Lutman bin Rumadi di Magelang). Universitas Tidar. Vol. 3 No. 2. 1331.
- Trifena Julia Kambey, Tonny Rompis, Altje A. Musa, 2020 ANALISIS YURIDIS MENGENAI UNSUR MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI. *Lex Crimen* Vol. 9 No. 3.. 210-211.

Artikel

2014. *Beda Keuangan Negara dan Kekayaan Negara.*,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>. Diakses tanggal 10 Agustus 2025 pukul
23.49 WIB
2017. *Kejahatanperekonomian*, <https://www.kompasiana.com>. Diakses tanggal
13 September 2025, Pukul 20.38.
2024. Kinerja 2020-2024: KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp2,5
Triliun. <https://kpk.go.id/>. Diakses tanggal 2 September 2025, Pukul 00.03
WIB.
2024. *Membangun kegiatan usaha mandiri*, <https://www.kompasiana.com>
Diakses tanggal 20 September 2025 Pukul 22.40 WIB.
- 2016, Sekali Lagi, Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Tipikor
<https://www.hukumonline.com>., Diakses tanggal 15 September 2025 Pukul
22.07 WIB.

Seminar

Barda Nawawi Arief, Sistem Pemidanaan Dalam Konsep RUNDANG-
UNDANG KUHP, Bahan Sosialisasi RUNDANG-UNDANG KUHP 2004,
diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tanggal. 23-24 Maret
2005, di Hotel Sahid Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan

Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1970 Nomor
59K/Kr/1973.

Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENGENAAN SANKSI UANG PENGGANTI DALAM
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA
NOMOR 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program
Sarjana (S1) Hukum**

Oleh :

ALFAHD FAYYAZ ADKESA WURYAN

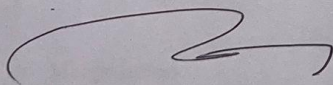
NIM. 11000121140822

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak

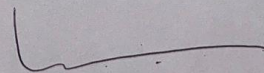
Mengetahui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Prof. Dr. Pujiyono, SH. M.Hum.
NIP 196308221990011001



Dr. Umi Rozah, SH. M. Hum.
NIP 197101271999032001